

## BAB II

### ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR

Konflik antar etnis yang berlangsung selama puluhan tahun dengan tidak adanya solusi konstruktif telah menghasilkan stereotype bahwa konflik Rohingya sebagai bentuk representasi dominasi kelompok mayoritas terhadap minoritas yang dibungkus dengan isu-isu sara serta diperparah dengan adanya sikap Pemerintah Myanmar yang cenderung pasif dan melakukan pembiaran terhadap terjadinya konflik Rohingnya. Kondisi ini tentunya menjadikan permasalahan Rohingnya sebagai sebuah isu sensitif yang dengan sangat mudah berkembang menjadi konflik terbuka atau bahkan perang saudara dalam bangsa Myanmar.

#### A. Mengenal Myanmar

Negara Myanmar dulu dikenal sebagai Birma atau Burma, karena sejak 1972 menyebut negaranya dengan nama Republik Sosialis Uni Burma (Dyadaungan Socialist Thammada Myanma Nainngnan). Namun sejak 18 Juni 1989, secara resmi menukar nama negara, dari Burma menjadi Myanmar, dan ibukotanya, dari Rangoon menjadi Yangoon. Negara ini secara geografis terletak dianak ekor benua India, timur dengan China, dan selatan dengan Thailand. Luas seluruh wilayahnya adalah 678.000 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 45 juta.<sup>16</sup>

Myanmar merupakan negara yang terdiri dari beragam etnis dengan segala konflik antar etnis yang berlangsung sejak lama. Beberapa kelompok

---

<sup>16</sup> DR. H. Saifullah, SA. MA., *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 186

etnis utama yang ada di Myanmar, diantaranya adalah Bamar atau Birma, 2/3 dari total warga Myanmar, beragama Budha, menghuni sebagian besar wilayah negara kecuali pedesaan. Karen, suku yang beragama Buddha, Kristen, atau perpaduannya yang menghuni pegunungan yang berbatasan dengan Thailand. Kayah, etnis yang beragama Buddha namun masih berhubungan genetis dengan etnis Thai. Arakan, juga disebut Rakhine, umumnya beragama Buddha dan tinggal di perbukitan Myanmar barat. Mon, etnis yang beragama Buddha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand. Kachin, kebanyakan beragama Kristen. Chin, kebanyakan beragama Kristen, menghuni dekat perbatasan India. Rohingya, etnis yang beragama Islam yang tinggal di utara Rakhine.<sup>17</sup>

Sejarah mencatat bahwa selama abad XIX negara ini menjalani tiga kali perang daudara (1824-1826, 1852, dan 1895). Pada 1937, Myanmar (waktu itu Burma) mendapatkan pemerintahan sendiri di bawah Gubernur Inggris. Uni Burma mencapai kemerdekaannya pada 1948 dan melaksanakan sistem politik liberal hingga Maret 1962, ketika terjadi kudeta militer. Sejak itu Burma berada di bawah pemerintahan militer yang menjalankan kekuasaan melalui program Partai sosialis Burma (Burma Socialist Program Party/BSPP), satu-satunya partai politik yang diizinkan hidup sejak 1962. Pada 1974, sebuah konstitusi baru diberlakukan dan Burma diberi nama Republik Sosialis Persatuan Burma (Socialist Republic Of the Union Burma). Pada 1948, segera setelah mendapat kemerdekaan Burma, U Nu menjadi Perdana Menteri

---

<sup>17</sup> Kyaw Yin Hlaing, et al, *Myanmar Beyond Politics to Societal Imperatives*, Singapore, Institute Of Southeast Asian Studies, 2005, hal. 59

pertama negeri ini. oleh karena kegagalannya menjalankan pemerintahan yang efektif, pada 1962 U Nu digulingkan oleh Jendral Ne Win. Akibatnya mulai 1972 Burma semakin tertutup dengan dunia luar.

### **B. Muslim di Myanmar**

Menurut para sejarawan, para pelaut muslim telah datang ke Burma (Myanmar) pada abad ke IX pada 860 M. Namun sebelumnya memang sudah ada beberapa pedagang Arab yang menetap di garis pantai selama abad 1 tahun hijriah (abad VII maschi). Para pengelana dari cina menemukan daerah koloni Persia diperbatasan Yunnan. Seorang pelancong Persia, Ibnu Khordabheh, pelancong dari arab abad IX, Suleiman, dan pelancong Persia abad ke X, Ibnu al Faqih, dalam tulisan-tulisan mereka telah menyebut tentang daerah Burma Selatan.<sup>18</sup>

Pada saat terjadi imigran besar-besaran pada masa kependudukan Inggris, mempengaruhi hubungan antara orang-orang Burma dengan kaum muslim. Asimilasi kaum muslim dengan orang-orang Burma menjadi satu hal yang menarik. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan digantikannya para pemimpin Burma, yang sebelumnya banyak berasal dari orang-orang pribumi, menumbuhkan kebangkitan etnik, budaya, dan kebanggaan keagamaan di kalangan kaum muslim. Posisi mereka yang cukup menguntungkan dibidang ekonomi memungkinkan mereka mengambil alih perkembangan organisasi-organisasi yang menguntungkan mereka. Masjid-masjid baru didirikan dan lembaga-lembaga pendidikan Islam dipromosikan

---

<sup>18</sup> *op cit.*, hal 188

dengan antusias. Burma bagi para imigran muslim tampaknya merupakan perluasan dari wilayah India, yang juga merupakan jajahan Inggris. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan dalam pelajaran agama di kalangan kaum muslim, meskipun Tamil dan Benggali juga digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kesusastraan Islam, yang dilatarbelakangi budaya India tersebar luas dikalangan muslim.<sup>19</sup>

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, gelombang imigran telah turut memperbesar populasi muslim Burma dan bersamaan dengan itu, semangat kebangkitan Islam yang dibawa saudara-saudara barunya juga mempengaruhi muslim Burma. Menurut sensus penduduk 1993, populasi kaum muslim mencapai 10,7 % dari jumlah penduduk Burma yang berjumlah 44,3 juta. Secara geografis, masyarakat muslim tersebar diseluruh Burma dan kebanyakan merupakan golongan masyarakat urban. Kota terbesar seperti Rangoon dan Mandalay sangat diwarnai oleh masyarakat muslim. Demikian juga di kota-kota diwilayah Arakan, seperti Buthidaung dan Yathedaung, kaum muslim merupakan mayoritas. Di wilayah yang bersebelahan dengan Bangladesh mayoritas penduduknya juga merupakan muslim.<sup>20</sup>

Secara umum ada empat kategori kaum muslim di Myanmar, yaitu muslim India (*Kala Pathe*), muslim Burma (*Zarbadee*), muslim Melayu dan muslim China (*Pashu* atau *Panthay*). Kaum muslim Burma tetap

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 189

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 193

menggunakan nama-nama Burma, meskipun mereka juga menggunakan nama muslim yang bisa dipakai diwilayah dan lingkungan mereka sendiri.<sup>21</sup>

Secara politik akan tampak bahwa kaum muslim Burma menikmati proteksi dan kebebasan yang lebih besar selama periode demokrasi. Kudeta militer tahun 1962, yang disusul dengan sistem politik yang didominasi dengan militer di bawah kepemimpinan Burma Socialist Programme Party/BSPP, mencekik ruang politik oposisi dan mempersempit ruang partisipasi mereka dibidang politik. Organisasi-organisasi seperti Burmese Muslim Congress (BMC), yang dibentuk pada 1945 yang diketuai oleh U Razak, merupakan organisasi yang cukup loyal pada kepentingan rakyat Burma, sedangkan Islamic Centre of Burma (ICB) bersikap lebih simpatik dan dekat ke BSPP dan pemerintah Burma.

Masyarakat muslim terwakili dalam BSPP dan pemerintahan, meskipun kehadiran mereka dalam pemerintahan tidak untuk memperjuangkan cita-cita muslim, tetapi untuk keseluruhan masyarakat Burma. Berbeda dari kaum muslim BSPP, Jami'atul Ulama bersikap mendua, antara oposisi dalam beberapa kasus atau kesempatan tertentu dan mendukung pemerintah pada kasus dan waktu lainnya. Pada saat yang sama di perbatasan Arakan dan Bangladesh, tempat kaum muslim menjadi populasi yang dominan, Rohingya National Liberation Front (RNLF), terus mengadakan perlawanan terhadap pemerintah Burma dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu memisahkan diri dari Burma.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 193

Muslim Rohingya lebih dikenal karena perjuangan bersenjata untuk mendapatkan otonomi di wilayah Arakan Utara. Walaupun perjuangan mereka mengalami kemunduran pada sejak 1961. Dengan perjuangan bersenjata yang mereka lakukan ini justru memperburuk kondisi mereka dan perlakuan buruk yang mereka terima dari junta militer yang berkuasa.<sup>22</sup>

I-hui dan Zebadi yang tinggal di wilayah perkotaan dan hidup ditengah masyarakat lainnya memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap Myanmar dan siap kerja sama dengan komunitas lainnya. Oleh karenanya, mereka menjadi lebih diterima sebagai bagian tidak terpisah dari warga Myanmar lainnya dan memiliki akses pada sumber-sumber ekonomi dan berbagai posisi setara dengan pribumi. Muslim keturunan-keturunan India, HuMasyarakat Huihui di Myanmar semakin menunjukkan kecenderungan membaur dengan warga lainnya. Hal yang unik dari mereka adalah kecenderungan memilih pasangan dengan wanita Burma yang berasal dari suku dan agama yang berbeda. Semangat pembauran ini semakin meningkat sejak 1970-an, dengan resiko mereka semakin kehilangan identitas lokal dan semakin menonjolkan semangat nasionalismenya.<sup>23</sup>

### **C. Sejarah Muslim Rohingya**

Salah satu isu krusial yang cukup menyita perhatian publik internasional terkait dengan terjadinya konflik antar etnis adalah konflik etnis Rohingya. Akan tetapi, sebelum mennguraikan lebih jauh mengenai konflik etnis

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 196

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 197

Rohingnya, maka peneliti akan menjelaskan tentang sejarah asal-usul etnis Rohingnya di Myanmar.

Gambar 2. Peta Lokasi Konflik Rohingya di Arakan



Sumber : "Atasi Kerusuhan, Myanmar Bentuk Komite Khusus" dalam <http://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/03/31/mkj7b4-atasi-kerusuhan-myanmar-bentuk-komite-khusus>. Diakses pada 20 Maret 2013

Arakan adalah sebuah wilayah dengan luas 36.762 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk pada 1969 sebesar 1.847 jiwa. Penduduk ini terbagi dalam dua komunitas keagamaan; muslim (disebut *Rohingya*) dan Buddis (disebut *Mogh*).<sup>24</sup> Rohang, adalah sebutan kata Arakan sebelumnya. Arakan

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 195

merupakan tempat yang cukup terkenal bagi para pelaut Arab sebelum adanya Islam. Saat itu banyak orang-orang seperti Arab, Moor, Turki, Moghuls, Asia Tengah, dan Bengal yang datang sebagai pedagang, prajurit, dan ulama. Mereka datang melalui jalur darat dan laut. Pendatang tersebut banyak yang tinggal di Arakan dan bercampur dengan penduduk setempat. Percampuran suku tersebut membentuk suku baru yaitu suku Rohingya. Oleh karena itu, muslim Rohingya yang menetap di Arakan sudah ada sejak abad ke-7 dan mereka tidak terbentuk dari satu suku saja. Mereka terbentuk dari percampuran berbagai suku yang berbeda.<sup>25</sup>

Arakan, yang pada asal mulanya dinamakan Rohang, merupakan sebuah bangsa yang berdiri sendiri sejak awal mula sejarah bangsa itu. Oleh karena itulah, mereka dinamakan orang Rohangya, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Rohingya. Arakan itu sendiri merupakan kata jamak dari rukn, berasal dari kata bahasa Arab yang artinya 'tiang-tiang'. Kata tersebut mencirikan keislaman dari etnis Rohingya.<sup>26</sup>

Suku Rohingya sebenarnya adalah orang-orang Islam dengan budaya mereka yang jelas terlihat di Arakan. Hal itu karena mereka menurunkan agama mereka pada seluruh keturunan mereka dari bangsa Arab, Moor, Pathan, Moghul, Asia Tengah, Bengal dan beberapa bangsa Indo-Mongol. Percampuran dari berbagai suku, membuat penampakan fisik unik mereka seperti tulang pipi yang tidak begitu keras, mata mereka tidak begitu sipit (seperti orang Rakhine Magh dan orang Burma), hidung mereka tidak begitu

---

<sup>25</sup> Mohammad Ashraf Alam "A Short Historical Background" 7 Maret 2006, terdapat di situs [http://www.rohingyatimes.i.p.com/history/history\\_maa.html](http://www.rohingyatimes.i.p.com/history/history_maa.html)

<sup>26</sup> *Ibid*

pesek. Mereka lebih tinggi dari orang Rakhine Magh tetapi kulit mereka lebih gelap, beberapa dari mereka kulitnya kemerahan, tetapi tidak terlalu kekuningan.<sup>27</sup>

Muslim Arab datang pertama kali pada abad VII masehi, atau sesudahnya. Pada awalnya mereka menempati kawasan disekitar pantai Arakan, dan kemudian keselatan dan menyebarkan Islam dan menjadi pelaut-pelaut hebat. Pengetahuan mereka tentang navigasi, ilmu garis lintang dan garis bujur, fenomena astronomi, dan geografi negara-negara telah membuat mereka tak tertandingi dalam hal berdagang di Samudra Hindia selama beberapa abad. Orang-orang Arab tersebut menulis tentang tempat-tempat yang mereka datangi untuk membuktikan kedatangan mereka di dunia Timur dan Barat. Sejarawan Arab yang hidup di abad X, Al-Maqdisi, membicarakan hubungan yang telah berkembang antara Burma dan India, Kepulauan Melayu dan Srilanka. Sejarah Burma mencatat posisi orang-orang Arab dimasa pemerintahan raja Anawartha (1044-1077) yang bekerja sebagai penunggang kuda baginda. Pengganti Anawartha, Raja Sawlu (1077-1088), dididik oleh serang guru muslim berkebangsaan arab dan mengangkat anak sang guru, Yaman Khan, sebagai Gubernur Kota Ussa, yang sekarang bernama Pegu. Sebuah konspirasi di lingkungan istana membuat Yaman Khan memberontak. Usahanya untuk menguasai pagan digagalkan oleh Kyanzitta, saudara Sawlu, yang memperbolehkan adanya suatu perkampungan muslim di pedalaman Burma. Di abad ke XIII, ketika pasukan Khubilai Khan- yang didominasi oleh

---

<sup>27</sup> *Ibid*

tentara-tentara muslim, dibawah pimpinan Nasruddin, anak gubernur Yunnan-menyerang daerah Pagan, keberadaan mereka diBurma kembali terasa.<sup>28</sup>

Suatu negara Islam pernah didirikan di Arakan ketika Sultan Bengal yang beragama Islam, Naseerudden Mahmud syah (1442- 1459), membantu raja Sulayman Naramitha membangun negara Islam. Pemerintahan muslim berlangsung beberapa abad di Arakan dan meluas ke selatan hingga mencapai Moulmein pada masa pemerintahan Sultan Salim Shah Rasagri (1593-1612 M). bahasa Persia merupakan bahasa resmi bagi negara Islam Arakan yang beribukota di Myohaung. Pada 1784 penduduk Burma pengikut Budha berhasil menaklukan negara Islam Arakan, yang diikuti antara 1824-1826 leh pendudukan Inggris. Ketika Burma merdeka, arakan dimasukkan kedalam negara Burma.

Pada masa pendudukan Inggris atas Burma mendatangkan imigran Benggali dari wilayah Chittagong yang berbatasan langsung dengan Myanmar Barat untuk bekerja sebagai pekerja pertanian dan perkebunan di wilayah Arakan yang subur. Kebijakan Inggris tersebut memberikan dampak besar kepada populasi bangsa Benggali dan kaum Rohingya di Myanmar yang menjadikan mereka sebagai kaum mayoritas di beberapa kota besar seperti Yangoon, Akyab (Sittwe), Bassein (Pathein) dan Moulmein. Pada masa itu kaumBurma dibawah penguasaan Inggris merasa tidak berdaya terhadap imigrasi besar-besaran tersebut dan hanya merespon dengan sentiment rasial antara superioritas dan ketakutan. Keadaan menjadi sulit ketika perang dunia

---

<sup>28</sup> DR. H. Saifullah, SA. MA., *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 188

ke dua. Inggris yang berusaha mempertahankan eksistensinya menggunakan pejuang-pejuang Rohingya dan kaum imigran Benggali untuk melawan Jepang dan kaum nasionalis Burma (Myanmar). Namun, pada akhirnya Burma dapat meraih kemerdekaannya pada 1948. Sejak itulah konflik dan penderitaan etnis Rohingya terjadi.<sup>29</sup>

#### D. Kondisi Kehidupan Etnis Rohingnya di Myanmar

##### 1. Penduduk

**Tabel Perbandingan Kondisi Kehidupan Rohingnya dan Bamar**

Etnis	Jumlah Penduduk	Agama	Pekerjaan	Pendidikan
Bamar (Mayoritas)	30.124.000 Jiwa	Budha	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Militer</li> <li>➤ Birokrat</li> <li>➤ Polisi</li> <li>➤ Politisi</li> <li>➤ Pedagang</li> <li>➤ Dll</li> </ul>	Pendidikan  Layak
Rohingya	1.460.000 Jiwa	Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Petani</li> <li>➤ Nelayan</li> <li>➤ Pedagang</li> <li>➤ Pengerajin Tangan</li> <li>➤ Tukang Kayu</li> </ul>	Akses  Pendidikan  Susah

Sumber Data : Hasil rangkuman dalam buku DR. H. Saifullah, SA. MA., *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 192

Pada tahun 1982, tercatat sekitar 2,6 juta orang hidup di Arakan. Dari angka ini sekitar 1.460.000 adalah muslim (sekitar 56%) dari total penduduk di wilayah ini), sedangkan 2,1 juta muslim lainnya hidup di bagian Myanmar lain.<sup>30</sup>

Penduduk Rohingya hidup dengan bercocok tanam. Hasil produksi pertanian utama di Arakan berasal dari Rohingya. Sebagian penduduk yang lain bekerja sebagai nelayan, pedagang, pengerajin tangan, dan tukang kayu. Oleh karena diskriminasi yang menimpa mereka, penduduk Rohingya mulai kehilangan tanah dan menjadi tuna wisma. Lahan perkebunan mereka diambil oleh masyarakat Budha yang datang dari dalam dan dari luar Arakan pada tahun 1942. Selain itu pajak tinggi terhadap hasil pertanian dan pengambilalihan tanah membuat mereka hidup dibawah garis kemiskinan dan mengalami kelaparan. Jumlah pengusaha semakin menurun, mereka tidak diizinkan melakukan kegiatan bisnis secara bebas. Rezim militer telah melarang mereka mendapatkan hak kebebasan di kotanya. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari muslim Rohingya.<sup>31</sup>

## **2. Agama dan Budaya Muslim Rohingya**

Masyarakat Rohingya adalah penganut agama Islam yang taat. Sebagian besar dari muslim Rohingya, para laki-lakinya menumbuhkan janggut dan para wanitanya memakai jilbab. Rumah-rumah mereka dikelilingi oleh

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 195

<sup>31</sup> Nurul Islam, "Facts About The Rohingya Muslims of arakan", terdapat di situs <http://www.rohingya.com/rohi/summary.htm>

dinding-dinding bambu yang tinggi. Di Arakan, disetiap desa terdapat masjid dan madrasah (seklah untuk penganut agama Islam). Laki-laki Rohingya salat secara berjamaah sedangkan para wanita salat dirumah.

Semua kegiatan sosial seperti menolong orng miskin, janda, dan anak yatim, serta acara pernikahan dan kematian dilakukan oleh suatu lembaga sosial yang ada disetiap desa. Lembaga tersebut disebut samaj. Ulama dalam lingkungan muslim Rohingya memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam masalah hukum, seperti masalah keluarga muslim Rohingya.<sup>32</sup>

### **3. Pendidikan Muslim Rohingya**

Sebelum junta militer berkuasa tahun 1962, muslim Rohingya memiliki posisi yang sama dengan masyarakat mayoritas Budha. Akibat kemiskinan, diskriminasi sosial dan serangan yang terus melanda mereka, jumlah pelajar-pelajar muslim Rohingya menurun drastis. Pendidikan tingkat dasar, apalagi tingkat tinggi, tidak bisa dengan mudah mereka dapatkan.

Terdapat sejumlah sukarelawan di sekolah-sekolah agama untuk memberikan pendidikan pada pelajar-pelajar muslim Rohingya. Namun, dengan adanya berbagai larangan, minimnya dana dan fasilitas membuat mereka tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Hal inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa menciptakan pemuda-pemuda yang

---

<sup>32</sup> *Ibid*

berpendidikan untuk membantu menyelesaikan masalah masyarakat Rohingya.<sup>33</sup>

#### **4. Status Politik Muslim Rohingya**

Sebelum 1962, muslim Rohingya dikenal sebagai etnis bangsa pribumi Burma. Mereka memiliki perwakilan di Parlemen Burma, beberapa dari mereka diangkat menjadi Menteri, Sekretaris Parlemen, dan di beberapa posisi pemerintahan lainnya. Setelah rezim militer berkuasa, secara sistematis hak politik mereka dicabut, pegawai-pegawai pemerintahan yang sebelumnya diduduki oleh muslim Rohingya diganti oleh orang-orang Budha Arakan.

Pada awal kemerdekaan, budha arakan yang fundamentalis menuduh nasionalisme muslim Rohingya sebagai pro Pakistan. Berdasarkan pada tuduhan tersebut muslim Rohingya sulit menjadi tentara, pejabat sipil, polisi, dan kepala desa di wilayah mereka sendiri. Keadaan tersebut makin parah setelah dikeluarkannya Undang-Undang kewarganegaraan 1982 yang menyatakan bahwa mereka bukan penduduk asli Burma. Pemerintahan tidak lagi mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik pemerintahan Burma.<sup>34</sup>

#### **5. Perlakuan Terhadap Muslim Rohingya**

Dibawah pemerintahan kolonial, masyarakat muslim menduduki posisi senior dibidang pelayanan umum dan masyarakat sipil. Selama tahun 1920-an

---

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

dan 1930-an , kelompok nasionalis muslim muda berada di garis depan menuntut kemerdekaan dari Inggris. Setelah pembentukan Union of Burma tahun 1948, sejumlah muslim menempati posisi tinggi di pemerintahan, dibawah pimpinan Perdana Menteri U Nu yang beragama Budha. Setelah kudeta militer tahun 1962, sejumlah kecil muslim terus mengabdikan dibawah pemerintahan Jendral Ne Win.

Terhadap kelompok minoritas ini,pemerintah yang berkuasa memberlakukan larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu. Pemerintah melarang pembentukan perserikatan dan melarang munculnya gerakan yang mempertanyakan tentang hak-hak buruh. Tidak jarang, mereka memperoleh perlakuan kasar, dan tidak berkeprilaku manusiawi. Hal itu menyebabkan sakit dan kematian merupakan hal yang lekat dengan keseharian mereka.

Diperkirakan, pemerintah Burma telah melakukan paling tidak 13 operasi bersenjata melawan Rohingya semenjak 1948. Mereka melucuti senjata, menutup sekolah agama, dan membakar masjid-masjid. Pada 1975, sekitar 15.000 penduduk muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh, untuk melarikan diri dari penganiayaan. Pada 1978, operasi militer massif , yang dikenal dengan nama Operasi Naga Min, memaksa sekitar 200.000 orang Rohingya untuk keluar dari Burma. Operasi tersebut meliputi relokasi paksa muslim disertai pemerkosaan, pemaksaan, dan pengusuran masjid. Rezim yang berkuasa menyalahkan kelompok pengacau Bengal atas kejadian itu.

### **E. Konflik Antar Etnis**

Myanmar dikenal sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang sarat dengan permasalahan konflik antar etnis. Bahkan konflik ini terus dipelihara oleh Pemerintahan Junta Militer sebagai salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi kekuasaan dan legitimasinya. Salah satu konflik antar etnis yang paling banyak menyita perhatian publik internasional adalah konflik yang melibatkan etnis Rohingnya yang mendiami wilayah Arakan.<sup>35</sup>

Konflik yang terjadi di Arakan ini tidak berhenti sejak kudeta Militer Myanmar hingga saat ini. Bahkan pada bulan Juni 2012 terjadi peristiwa konflik komunal dalam skala besar yang dipicu oleh isu adanya pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pemuda etnis Rhingya terhadap gadis etnis Rakhine. Isu tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik komunal antar kedua etnis yang memang sudah lama terpendam permusuhan dan kebencian serta kebijakan marginalisasi oleh rezim pemerintah militer.

#### **1. Akar Sejarah Konflik**

Terjadinya konflik Rohingya dipicu oleh bibit perseteruan yang sudah terpendam lama, yaitu perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Sebagian besar kelompok etnis yang ada di Myanmar merupakan pemeluk agama Budha khususnya etnis Burma yang merupakan kelompok mayoritas. Berlangsungnya konflik antar etnis yang berlarut-larut tersebut telah menumbuhkan sikap kebencian dan permusuhan yang begitu mengakar kuat oleh etnis Burma dan etnis

<sup>35</sup> <http://jakarta.okezone.com/read/2012/08/17/411/679197/sejarah-masyarakat-rohingya>, diakses 6 Desember 2012

lainnya terhadap etnis Rohingya yang dianggap berbeda oleh kelompok mayoritas, baik dari aspek etnisitas maupun dari aspek keyakinan agama yang dianut. Kondisi ini diperparah oleh sikap rezim junta militer yang mendukung dan memelihara terjadinya konflik komunal antar etnis yang dibungkus dengan isu-isu SARA sehingga semakin menyulut berkembangnya konflik antar etnis yang mengarah pada upaya penghapusan etnis Rohingnya sebagai bagian dari komponen bangsa Myanmar. Sikap kebencian dan permusuhan yang ditanamkan oleh rezim junta militer dan kelompok etnis mayoritas Burma terhadap etnis Rohingya telah membangun potret dan stigma masyarakat internasional bahwa konflik komunal antar etnis yang terjadi di Myanmar sebagai bentuk dominasi/tekanan kelompok mayoritas terhadap minoritas yang dibungkus dengan isu-isu rasial dan agama yang sangat sensitif. Bahkan, mengutip laporan berbagai berita media massa sampai saat ini sejak insiden yang terjadi pada Juni 2012, sudah terjadi tragedi pembantaian etnis Rohingya yang notabene beragama Islam) lebih dari 6000 orang. Suatu bentuk kejahatan kemanusiaan (genosida) yang menjurus pada upaya penghapusan suatu etnis bangsa yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai peradaban manusia. Berdasarkan sejarah, akar dari konflik Rohingya adalah etnis Rohingnya sebagai korban sejarah dan Perlakuan kejam, brutal, minoritas dan diskriminatif dialami oleh etnis Rohingya. Kondisi kehidupan mereka benar-benar sangat memprihatinkan. Kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh etnis lain dan Pemerintah Myanmar sudah melewati batas nilai-nilai kemanusiaan dan bahkan dikategorikan sebagai bentuk genosida.

Karenanya, banyak warga Rohingya yang terpaksa migrasi keluar dari negerinya untuk menyelamatkan diri.<sup>36</sup>

Di masa pendudukan Jepang tahun 1942, sebagian besar masyarakat muslim di Arakan tetap pro Inggris. Untuk mempertahankan loyalitas dukungan ini, pemerintah Inggris menjanjikan pada kaum muslim, menjadikan wilayah Arakan Utara sebagai wilayah muslim secara nasional. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia II, dan Inggris kembali menduduki Burma, tokoh-tokoh dari masyarakat muslim Rohingya yang berkolaborasi dengan Inggris ditunjuk untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam birokrasi dan administrasi lokal di Arakan. Di masa itu Inggris juga banyak mendatangkan imigran muslim yang berasal dari Chittagong. Inggris juga mengundang ratusan ribu pengungsi muslim di Arakan Selatan yang menyebrang ke India di tahun 1942 untuk kembali ke Arakan Utara.<sup>37</sup>

Kedatangan tentara Inggris yang bermaksud menduduki Burma, menimbulkan harapan bagi etnik Rohingya yang tersisa. Sehingga, kaum Rohingya yang dulunya melarikan diri saat invasi bangsa Burma, kembali pulang ke kampung halamannya. Penjahat British mendatangkan imigran Benggali dari wilayah Chittagong yang berbatasan langsung dengan Myanmar bagian barat untuk bekerja sebagai pekerja pertanian dan perkebunan di wilayah Arakan yang subur.

---

<sup>36</sup> <http://www.barubaca.com/2012/08/penyebab-konflik-rohingya.html>, diakses 10 desember 2012

<sup>37</sup> Riza Sihbudi, dkk., *Problematika Minoritas Muslim di Asia Tenggara: Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya* (Jakarta: PPW-LIPI, 2000), hal. 150

Berdasarkan afiliasi keagamaan dari mayoritas penghuninya, Arakan terbagi kedalam dua distrik; di bagian utara merupakan distrik muslim, dan di bagian selatan merupakan distrik kaum Budha.<sup>38</sup> Sejak pemerintahan kolonial Inggris, kelompok Budha dan muslim Arakan sudah saling bermusuhan satu sama lain. Mereka saling bersaing untuk memperebutkan sumber-sumber daya ekonomi. Di bagian selatan Arakan orang-orang Budha merupakan kelompok mayoritas sedangkan Islam tergolong minoritas. Sebaliknya, di Arakan Utara, kaum muslim merupakan mayoritas sedangkan Budha adalah minoritas. Di Arakan selatan, mayoritas Budha sering menyerang minoritas muslim. Hal itu menyebabkan gelombang pengungsian kaum muslim ke Arakan Utara. Terdapat pula sekitar 22.000 orang muslim Arakan yang menyebrang ke daerah perbatasan Bangladesh. Cerita yang dibawa oleh para pengungsi muslim yang mencapai daerah Maungdaw di Arakan Utara tentang perlakuan kaum Budha mengakibatkan kemarahan penduduk asli muslim di sana. Sebagai pelampiasan dendam, penduduk muslim di Arakan Utara itu menyiksa kaum minoritas Budha. Pada akhirnya, penyerangan ini mengakibatkan kelompok Budha di Arakan Utara menyebrang ke selatan tempat mayoritas kaum Budha.<sup>39</sup>

Setelah kemerdekaan Burma, posisi para pejabat dan pegawai muslim di Arakan Utara banyak yang diganti oleh pemerintah Burma dengan kaum Budha Arakan. Kaum muslim yang menduduki tanah-tanah di Arakan Utara diusir begitu saja, tanpa menyediakan lahan baru sebagai penggantinya.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 150

<sup>39</sup> *Ibid*

Perlakuan semena-mena dari pemerintah Burma ini diperburuk lagi dengan kegagalan pemerintah Burma untuk memenuhi janji Inggris; menjadikan Arakan Utara sebagai wilayah administrative muslim yang mandiri.<sup>40</sup>

Dapat kita lihat dari perspektif historis, permasalahan Rohingya disebabkan oleh kebijakan Inggris yang meninggalkan Myanmar setelah perang dunia kedua dengan terpaksa melepaskan beberapa tanah jajahannya kepada kaum nasionalis tanpa memberikan legalitas perlindungan kepada kaum Rohingya yang banyak membantu Inggris pada perang dunia kedua. Hal ini semakin memberi kontribusi yang besar terhadap krisis kemanusiaan kaum Rohingya hingga sekarang ini.

Akibat sentimen masa lalu maka kaum Rohingya dimarjinalkan, didiskriminasikan, dan dizalimi. Bahkan, Pemerintah Myanmar tidak memberikan kewarganegaraan kepada warga etnik Rohingya (stateless person), sehingga dapat dikatakan mereka tidak memiliki hak sebagai manusia yang dilindungi oleh negara. Bukan hanya secara legalitas diabaikan, kaum Rohingya juga tidak memiliki hubungan sosial yang baik dengan etnik-etnik yang lain di Myanmar. Karenanya, seringkali timbul konflik komunal yang berujung pada tindakan-tindakan kejahatan brutal dan tidak berperikemanusiaan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 151

## 2. Konflik Material

### a) Pembatasan Akses

Diwilayah Arakan utara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, pemerintah pusat menekankan suatu aturan baru yang menyebabkan kerugian besar bagi muslim Rohingya. Aturan baru itu menyebutkan, bahwa petani, buruh pemotong kayu dan bambu, serta pekerja agrobisnis, harus menjual produk mereka kepada agen yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam harga yang sudah ditentukan. Mereka dilarang menjual produknya kepada orang lain. Untuk memperoleh fasilitas tersebut, para agen telah memberikan uang yang banyak kepada pemerintah.<sup>41</sup>

Pada tahun 1989, pemerintah militer Burma mengeluarkan kartu identitas baru penduduk. Kartu identitas tersebut tidak hanya memuat foto, nama orang tua, dan alamat, tetapi juga memuat asal suku bangsa dan agama. Kartu identitas baru itu harus selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Kartu itu juga dibuat sebagai persyaratan jika ingin membeli tiket untuk bepergian, mendaftarkan anak sekolah, melamar pekerjaan, termasuk semua kedudukan sebagai pegawai negeri, menjual atau membeli tanah, dan kegiatan sehari-hari lainnya.<sup>42</sup>

Muslim Rohingya tidak diperbolehkan memiliki kartu identitas tersebut. hal itu membuat mereka mengalami kesulitan bila akan bepergian. Mereka diperkenankan bepergian, setelah memperoleh izin perjalanan hanya untuk 12

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 175

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 90

jam saja dan hanya pada kasus tertentu seorang muslim diberikan izin perjalanan samapai bisa menginap. Untuk perjalanan yang jauh, seperti ke Maungdaw, Buthidaung, atau ke ibu kota provinsi Akyab, mereka sulit mendapatkan izin. Kesulitan memperoleh izin perjalanan itu menyebabkan masyarakat Rohingya sulit memperoleh pekerjaan, terutama pada musim panas, ketika pekerjaan pertanian menurun, Muslim Rohingya hidup dalam kamp konsentrasi dengan tidak mempunyai akses untuk bekerja, tidak ada peluang untuk berdagang dan bisnis, serta tidak ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan hak menikah pun dilarang.<sup>43</sup>

Kondisi diatas diperparah lagi dengan kewajiban untuk membayar berbagai macam pajak. Bila musim panen, para petani diharuskan menjual kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditetapkan. Disamping itu, pajak padi dihitung dari prosentase luas tanah yang dimiliki oleh petani, bukan dari hasil panen. Perhitungan ini merugikan petani Rohingya yang sebagian besar dari mereka mempunyai tanah tidak subur. Dengan kondisi tanah seperti itu dan pemerintah yang tetap memberlakukan pajak padi berdasarkan luas tanah, membuat banyak petani Rohingya tidak mampu membayar pajak.

Etnis Rohingya begitu terdiskriminasi, belum lagi perlakuan masyarakat Budha yang tidak manusiawi. Mereka mengambil lahan perkebunan milik etnis Rohingya karena etnis Rohingya merupakan komunitas yang beragama Islam di negara yang mayoritas beragama Budha, dan dianggap sebagai imigran gelap yang eksistensinya tidak diakui. Keberadaan etnis Rohingya

---

<sup>43</sup> *Ibid*

juga dianggap mengurangi hak atas lahan dan ekonomi, khususnya di wilayah Arakan, Rakhine. Hal ini disebabkan pandangan masyarakat Budha bahwa lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang mereka miliki bukan merupakan hak orang-orang Rohingya karena mereka tidak memiliki status kewarganegaraan yang sah sebagai warga Myanmar.

Dengan berbagai tekanan dan paksaan, baik dari pihak mayoritas Budha maupun pihak pemerintah, muslim Rohingya selalu mengalami perlakuan yang semena-mena. Muslim Rohingya seakan tidak lagi memiliki hak asasi untuk menentukan kehidupan mereka sendiri.

Akibat dari perlakuan sewenang-wenang yang mereka terima, saat ini banyak etnis Rohingya yang mencari pekerjaan ke negara lain. Diperkirakan ada 78 warga etnis Rohingya di Thailand, sedangkan kapal lainnya dengan 193 etnis Rohingya mendarat di Aceh. Karena tidak punya negara dan hidup di kamp-kamp PBB di Bangladesh mereka pun terbujuk tawaran pedagang manusia untuk bekerja di Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Singapura. Para agen memungut 30.000 taka (sekitar Rp 5 juta) atau lebih dari setiap orang untuk mencari kerja di Malaysia. Atau negara tetangga disekitarnya.<sup>44</sup>

Kemiskinan dan kesulitan lapangan kerja begitu mendera etnis Rohingya di Bangladesh. Mereka berani mengambil resiko seperti itu hanya karena harus bertahan hidup, sehingga bisa membuat kehidupan keluarganya semakin baik.

---

<sup>44</sup> *Kemiskinan Jebak Etnis Rohingya*, Media Indonesia, 31 Januari 2013

## **b) Perebutan Lahan**

Meskipun secara faktual menunjukkan bahwa konflik komunal yang terjadi di Myanmar khususnya yang menjadikan etnis Rohingya sebagai pihak yang dikorbankan, akan tetapi analisa beberapa pakar politik dan inteligen mengatakan adanya agenda terselubung yang bermotifkan ekonomi, yaitu pertarungan korporasi-korporasi dunia yang bekerjasama dengan pemerintahan junta militer. Argumentasi dari analisa ini didasarkan pada penerapan sistem baru di Myanmar yang memberlakukan undang-undang The Union of Myanmar Foreign Investment Law. Payung hukum ini adalah perlindungan terhadap sektor eksplorasi dan pengembangan sektor minyak dan gas alam yang melibatkan korporasi-korporasi asing. Pada kasus Arakan ini adalah pertarungan soal minyak dan gas bumi. Pada tahun 2005, perusahaan gas Cina menandatangani kontrak gas dengan pemerintah Myanmar untuk mengelola eksplorasi minyak. Banyak fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa konflik-konflik horizontal menandakan ada sesuatu yang yang diincar dari sisi geopolitik. Yang menarik dari sisi rezim militer di Myanmar dari era Ne Win hingga sekarang ini, ternyata melibatkan perusahaan asing seperti Chevron AS maupun Total Perancis, padahal kedua negara ini sangat gencar mengkampanyekan isu-isu demokrasi dan hak asasi manusia. Ini jelas menunjukkan ada pertarungan bisnis yang bermain melalui pintu belakang dari rezim militer Myanmar. Pernyataan Presiden Myanmar yang mengatakan bahwa kebijakan pengusiran etnis Rohingya dari wilayah Myanmar sebagai solusi terbaik mengakhiri konflik komunal tidak

mencerminkan seorang negarawan dan sangat bertentangan dengan HAM. Adanya fakta geologis yang menunjukkan bahwa wilayah Arakan merupakan wilayah yang kaya akan kandungan minyak dan gas alam menjadi indikasi kuat bahwa terjadinya konflik komunal yang terjadi di Arakan juga dipicu oleh motif kepentingan bisnis korporasi yang bernaung dibawah rezim junta militer. Atas dasar itu, eksplorasi minyak dan gas bumi itu menjadi incaran bukan hanya Cina tapi juga Amerika Serikat. Apalagi Chevron leading menjalankan aktifitasnya pertambangan minyak di Arakan, selain juga Petro China, Tiongkok Petroleum, Petronas Malaysia dan beberapa perusahaan minyak dunia lainnya.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan stemen presiden Myanmar, Thein Sein yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus konflik bernuasa etnis dan agama di Myanmar adalah mengusir muslim etnis Rohingya dari negara ini. Bahkan menawarkan kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka. Jika dilihat dari konteks pernyataan presiden Myanmar yang menunjukkan kekonyolan-kekonyolan yang tidak didasari oleh satu kerangka yang benar, tetapi justru menjebaknya dalam pertarungan besar dan masuk ke dalam perangkap The Clash of Civilizations. Secara sekilas tampak bahwa etnis Rohingya menjadi korban, akan tetapi sesungguhnya kedua belah pihak menjadi korban dari skenario agenda besar kelompok korporasi yang menjadikan isu konflik agama sebagai cara yang paling efektif tanpa melibatkan penguasa untuk mencapai tujuan penguasaan pengelolaan sumber

---

<sup>45</sup> <http://seputaraceh.com/read/9747/2012/07/21/agenda-tersembunyi-tragedi-rohingya-myanmar>, diakses 10 Desember 2012

minyak dan gas alam. Skema korporasi global seringkali menggunakan isu-isu konflik SARA sebagai senjata yang paling efektif untuk mencapai tujuan pragmatis mereka, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh PT Freeport Indonesia dengan membenturkan konflik antar suku di Papua Barat untuk melanggengkan kontrak karya mereka dengan Pemerintah Pusat Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Adanya indikasi yang menunjukkan campur tangan dan kepentingan korporasi dalam konflik komunal di Myanmar juga dijelaskan situs shwe.org, yang mempublikasikan bahwa pada tahun 2012 ini sedang dan akan dibangun proyek besar berupa pembuatan jalur pipa minyak dan gas yang menghubungkan pelabuhan Shwe dengan daerah Kunning, China. Pipa minyak Shwe sepanjang 771 km dengan diameter 32 inch akan dibangun akhir tahun 2012 dan selesai pada September 2013. Pipa ini dirancang untuk memindahkan tiga juta ton minyak dari daerah Shwe yang terletak di provinsi Arakan hingga daerah Kunning, China. Proyek ini dikerjakan oleh South East Asia Oil Petroleum (SEAOP). Kepemilikan saham ini dikuasai China National Petroleum Company sebesar 50,9% dan Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) sebesar 49,1%.<sup>47</sup>

Sedangkan pipa gas Shwe sedikit lebih panjang dari pipa minyak yaitu 793 km dengan diameter 40 inch. Jalur pipa gas ini sudah dibangun sejak September 2012 lalu dan direncanakan selesai pada bulan Juli 2013. Pipa ini berkapasitas memindahkan 12 juta kubik meter gas setiap tahun. Proyek ini

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> <http://politik.kompasiana.com/2012/08/09/analisis-politik-konflik-rohingya-483820.html>, diakses 10 Desember 2012

juga dikerjakan oleh South East Asia Gas Pipeline (SEAGP) yang kepemilikan sahamnya dikuasai oleh South East Asia Pipeline Co. sebesar 50,9%, Daewoo 25,041%, ONGP Caspian E&P 8,347%, MOGE 7,355%, Korea Gas Company 4,1735%, dan GAIL India Corporation sebesar 4,1375%. Masih di situs yang sama tersiar berita bahwa Myanmar untuk sekarang ini mempunyai tiga kilang minyak yang sudah berumur tua. Sangat sedikit menghasilkan minyak. Dibutuhkan modernisasi supaya bisa beroperasi efektif dan modern. Menurut otoritas pemerintah Myanmar, ketiga kilang minyak ini akan diprivatisasi. Ketiga kilang minyak tersebut terletak di wilayah Thanliyin, bagian dari Rangoon, Mam Thanpayarkan, dan satu lagi di Chauk.

Rancangan APBN negara Myanmar tahun 2012-2013 menargetkan produksi minyak pertahun sebesar 7,156 juta barel yang terdiri atas produksi di darat sebesar 3,435 juta barel dan produksi lepas pantai 3,721%. Pemerintah Myanmar sedang menyiapkan persetujuan tender untuk eksplorasi baik di daratan maupun di lepas pantai. Di situs webnya Total, Myanmar adalah negara tertua dalam hal produksi minyak yaitu tahun 1853. Rangoon Oil Company adalah perusahaan asing pertama yang mengebor minyak di negara tersebut, tahun 1871. Sejak saat itu hingga tahun 1963, minyak Myanmar dikuasai oleh asing. Pada tahun 1962 Myanmar dikuasai oleh Junta Militer yang condong pada Sosialis. Tahun-tahun berikutnya, oleh Junta Militer perusahaan minyak asing dinasionalisasi. Tahun 1963 Myanmar Oil and Gas Enterprise dibentuk.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid*

### **3. Konflik Non Material**

#### **a) Politik**

Sikap pemerintah Birma atau Myanmar yang menolak Rohingya sebagai salah satu etnis yang masuk dalam suku yang diakui kewarganegaraannya menjadi faktor penyebab utama terjadinya konflik komunal yang berkepanjangan. Kelompok etnis Rohingya yang tinggal dalam wilayah yang terisolir atau mungkin sengaja diisolasi dari dunia luar oleh pemerintahan junta militer dan kelompok mayoritas etnis Burma, mereka tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang sah. Oleh sebab itu ketika terjadi permasalahan, sangat sulit bagi dunia internasional untuk membantu para muslim Rohingya karena mereka sendiri telah dianggap sebagai imigran gelap yang datang dari Bangladesh. Undang-undang yang menentukan bahwa Rohingya tidak diakui sebagai salah satu etnis yang berhak mendapatkan kewarganegaraan merupakan bentuk legitimasi negara atas status etnis Rohingnya yang dinyatakan tidak menjadi bagian dari bangsa Myanmar. Padahal, berdasarkan undang-undang kewarganegaraan tahun 1982, yang dibuat rezim diktator Jendral Ne Win, pemerintah Myanmar mengelompokkan status kewarganegaraan dalam tiga kategori, yakni kewarganegaraan penuh, kewarganegaraan asosiasi, dan kewarganegaraan naturalisasi. Kewarganegaraan penuh diberikan kepada keturunan penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum 1823 atau lahir dari orangtua yang merupakan warga negara Myanmar. Status kewarganegaraan asosiasi diberikan kepada mereka

yang mengikuti UU kewarganegaraan serikat tahun 1948. Adapun kewarganegaraan naturalisasi diberikan kepada mereka yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan kewarganegaraan setelah 1982. Etnis Rohingya tidak dipertimbangkan masuk salah satu dari tiga kategori tersebut.<sup>49</sup>

Di dalam dekrit undang-undang yang dikeluarkan pwnguasa militer pada saat itu, Rohingya dicoret hak kewarganegaraannyadan mereka jadi tidak mempunyai Negara. Ne win memaklumkan bahwa Rohingya adalah rakyat tanpa Negara.<sup>50</sup> Padahal , status warga Negara sangat penting bagi penduduk muslim Rohingya. Dengan memperoleh status warga negara, mereka bias memperoleh kemudahan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Kebijakan itu telah menyebabkan kaum muslim Rohingya semakin mengalami penindasan, penyiksaan, tekanan, dan kematian ditangan penguasa tirani militer Burma. Pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, pelecehan terhadap wanita Islam, dan tindakan penangkapan yang sewenang-wenang. Selain itu pemerintah juga menghilangkan segala ciri yang berbau keIslaman.

Secara politik juga muncul kekhawatiran sebagian pemimpin/tokoh etnis Birma yang menganggap bahwa kelompok etnis Rohingnya menjadi ancaman serius terhadap masa depan eksistensi dan pengaruh etnis Burma di Myanmar setelah melihat adanya pertumbuhan populasi etnis Rohingnya yang cukup pesat. Secara historis, sikap kebencian dan permusuhan yang ditunjukkan oleh etnis Burma dan etnis-etnis lainnya di Myanmar terhadap etnis Rohingnya juga

---

<sup>49</sup> Jejak Kacau Masa Lampau, Media Indonesia, Selasa, 14 Agustus 2012

<sup>50</sup> "Apa salah Kami Sebagai Muslim?" <http://www.eramuslim.com/br/dn/34/6244.1.v.html>

tidak terlepas dari kebijakan penjajah Inggris yang memisahkan antara kelompok pribumi dengan kaum pendatang serta lebih banyak melibatkan etnis Rohingya untuk menopang kebijakan penjajahan baik yang dipekerjakan sebagai tentara maupun sebagai pekerja perkebunan sehingga menimbulkan sentiment dan dendam masa lalu terhadap etnis Rohingya yang dianggap banyak membantu kaum penjajah Inggris. Secara agama, sebagian besar etnis yang ada di Myanmar merupakan pemeluk agama Budha dan hanya satu-satunya etnis Rohingya saja yang merupakan pemeluk agama Islam. Sebagai akibat dari tindakan propaganda yang dilancarkan oleh pemerintahan rejim junta militer yang menginginkan Myanmar hanya terdiri dari satu etnis/suku bangsa saja, maka menimbulkan terjadinya konflik komunal kelompok mayoritas terhadap minoritas yang dibungkus dengan isu-isu agama dan rasial.

#### **b) Sosial**

Muslim Rohingya selalu mengalami pengalaman pahit atas ketidakadilan sosial budaya yang mereka terima selama bertahun-tahun. Ketidakadilan tersebut meliputi perlakuan atas suku dan posisi mereka sebagai kelompok minoritas.

Etnis Rohingya ditolak kehadirannya di negeri Birma. Lebih menyedihkan lagi, Presiden Myanmar, Thein Sein melontarkan pernyataan untuk mengusir muslim Rohingya sebagai penyelesaian konflik bernuansa etnis dan agama di negara itu. Bahkan dia menawarkan kepada PBB jika ada negara yang bersedia menampung mereka. Nasib muslim Rohingya semakin mengkhawatirkan. Di negaranya sendiri dianggap sebagai negara ilegal dan

diluar negara tidak diterima. Ribuan orang Muslim Rohingya menjadi korban pembantaian. Berdasarkan catatan pemerintah Myanmar, sejak insiden kekerasan pertama kali terjadi, sebanyak 78 warga Rohingya tewas, sementara 90 ribu penduduk minoritas itu kehilangan rumah dan harus hidup di penampungan. Dari data tidak resmi, korban tewas hampir pasti mencapai 650 jiwa. Beberapa sumber bahkan menyebut ribuan muslim Rohingya tewas selama dua bulan terakhir. Kejadian pembantaian etnis Rohingya terjadi ketika pada awal Juni 2012, sebanyak 10 pemuda muslim dibantai hingga tewas saat naik bus di perjalanan yang dipicu oleh adanya isu perkosaan terhadap perempuan Rakhine oleh pemuda muslim Rohingnya.<sup>51</sup>

Kondisi Muslim Rohingnya semakin mengkhawatirkan, Bangladesh sendiri tidak bersedia menampung mereka dengan alasan tidak mampu. Sehingga banyak pengungsi Rohingya ke Bangladesh dipulangkan kembali begitu tiba di Bangladesh. Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menyatakan negaranya tidak ingin ikut campur soal nasib pengungsi Rohingya. Kekerasan dua bulan terakhir yang menimpa etnis minoritas itu bagi dia urusan pemerintah Myanmar. Jangankan mendapat perlindungan, diperlakukan layak saja sudah sangat beruntung. Setibanya di pantai-pantai Bangladesh, mereka dikumpulkan dan dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Di bawah todongan senjata mereka dibariskan lalu diberi nasi bungkus dan satu botol air minum.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> <http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/29/kisah-tragedi-pembantaian-etnis-muslim-rohingya-dari-dulu-hingga-kini>, diakses 8 desember 2012

<sup>52</sup> *Ibid*

Tentara militer dengan menggunakan senapan serbu semi-otomatis yang biasa digunakan dalam perang itu, kemudian menggiring mereka ke dermaga. Setelah itu mereka disuruh naik ke sampan-sampan yang jauh dari layak untuk menyeberangi lautan. Dengan tanpa belas kasihan sedikitpun para militer tersebut melakukan perintah komandannya untuk memaksa para pengungsi itu untuk masuk ke sampan itu lalu kembalilah ke laut. Di Bangladesh ditolak di Burma diusir, sehingga para Muslim tak berdaya terkatung-katung di laut tidak tahu harus kemana. Tak peduli mereka mau kemana yang pasti tidak merepotkan Bangladesh. Praktis Muslim Rohingya itu kebingungan harus kembali ke mana. Sebab, di Myanmar mereka tidak diterima bahkan disiksa dan di Bangladesh juga diusir-usir. Bahkan Presiden Myanmar Thein Sein mantan jenderal militer itu mendukung kebijakan yang mendorong terjadinya penghapusan etnis. Thein Sein mengatakan, sekitar 800 ribu etnis Rohingya harus ditempatkan pada kamp pengungsi dan dikirim ke perbatasan Bangladesh. Lebih menyedihkan lagi ketika pejuang demokrasi Myanmar sekaligus peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi memilih diam menghadapi kebijakan Presiden Thein Sein dalam menyelesaikan kasus etnis Rohingya. Saat ini etnis Muslim Rohingya adalah salah satu kelompok yang paling teraniaya di dunia. Etnis Rohingya tidak boleh ada di Myanmar dan tidak diterima di Bangladesh. Tak ada pilihan selain naik sampan dan akhirnya terkatung-katung di samudera luas. Banyak di antara mereka yang gagal menaklukan ganasnya samudera sehingga harus tewas dan tenggelam di lautan luas dalam upaya pencarian tempat persinggahan hidup.

### c) Budaya

Upaya sengaja untuk merampas hak atas tanah, penolakan kewarganegaraan, pembantaian massa, pengusiran, pembakaran pelarangan pelaksanaan ibadah, penutupan jalur pasokan makanan, dan sejumlah tindakan brutal lainnya adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan diskriminatif yang menimpa Muslim Rohingya berlatar belakang agama ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung. Banyak konspirasi yang berkembang di Asia mengenai Rohingya, ada yang mengatakan muslim sebagai teroris, ada juga yang mengatakan muslim tidak mau murtad dan memeluk Budha hingga akhirnya dibunuh. Namun, dibandingkan dengan sekedar konspirasi, fakta yang berkembang adalah dibantainya etnis Rohingya di Myanmar.

Perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok minoritas merupakan perlakuan yang tidak bisa diterima. Munculnya pertentangan antara pemerintah dan masyarakat Burma dengan kelompok muslim minoritas pada intinya adalah sebagai akibat dari perbedaan karakteristik yang tidak bisa disatukan antara adat kebiasaan orang Burma dengan budaya Islam.

Secara umum, pemerintah sebenarnya mencanangkan kebijakan untuk memberi kebebasan kepada penduduk dalam menjalankan agama mereka masing-masing. Pada kenyataannya, pemerintah menerapkan banyak larangan, khususnya terhadap kelompok minoritas. Kitab suci Al-quran yang diterjemahkan kedalam bahasa lokal, tidak dapat diimpor secara legal. Izin untuk mendirikan masjid sangat sulit untuk didapatkan.

Dalam hal bepergian ke luar negeri seperti menjalankan ibadah haji atau menghadiri pertemuan keagamaan dengan luar negeri sebenarnya diperbolehkan. Namun, pembatasan dan pengawasan yang ketat serta kesulitan lain menghadang kelompok minoritas muslim ini. Seperti pembatasan masa berlakunya visa, sulitnya mengurus paspor, dan kecurigaan atas segala kegiatan yang dilakukan oleh kelompok minoritas muslim di dalam dan luar negeri. Contoh perlakuan yang dilakukan pemerintah Burma pada tahun 1962, tentang aturan pembatasan haji. Pada tahun tersebut, jamaah haji Burma berkisar 500 orang. Namun dengan adanya kebijakan uang ketat di era pemerintahan militer, jumlah tersebut turun drastis menjadi rata-rata hanya 16 orang. Itu pun hanya diberikan kepada orang-orang tua yang belum pernah pergi haji.<sup>53</sup>

Dalam pengaturan soal organisasi keagamaan, pemerintah menerapkan suatu mekanisme yang mewajibkan setiap organisasi keagamaan kelompok harus mendaftarkan diri pada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan ke Menteri Agama. Namun, persoalan yang bertentangan timbul ketika salah satu diantara organisasi tersebut yang memperoleh kesempatan untuk membuka rekening bank. Organisasi tersebut diharuskan membuat tembusan ke Dewan Gereja Burma bukan ke Menteri Agama.<sup>54</sup>

Terlebih lagi pemerintah Burma tidak mengakui keberadaan etnis Muslim Rohingya. Kondisi yang tidak nyaman ini diperparah lagi ketika pihak ultranasional dibawah pimpinan Jendral Ne Win pada tahun 1962 mulai

---

<sup>53</sup> Riza Sihbudi, *Op cit*, hal 62

<sup>54</sup> *Ibid*

membagi penduduk di Provinsi Arakan berdasarkan agama. Sehingga tidak mengherankan apabila etnis Rakhine yang beragama Budha dianakemaskan sedangkan etnik Rohingya beragama Islam dianaktirikan. Belum cukup itu, pada pada tahun 1982 junta militer mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang tidak mengakui etnis muslim Rohingya sebagai warga negara Myanmar. Padahal Rohingya penduduk asli Arakan yang sudah Islam sejak tahun 788 oleh pedagang Arab. Kemudian abad ke 11, penganut Budha Theravada menguasai Arakan, dengan kata lain, etnis Rohinya tidak diakui keberadaanya di negeri sendiri. Walaupun berbeda agama, kehidupan Muslim-Budha tidak banyak masalah. Mereka hidup toleransi tanpa ada konflik. Kehidupan mereka menjadi persoalan sejak kaum junta menguasai Myanmar dan mengusik kehidupan harmoni di Arakan.

Data terbaru, etnis Muslim Rohingya tersisa 800.000 jiwa lebih kurang dari 3 juta jiwa sebelumnya. Komunitas Muslim tersebar di 6 Kabupaten (township) dari sebelumnya menguasai 17 Kabupaten di Myanmar. Hal yang menyakitkan, pemerintah Burma menuduh etnis Rohingya sebagai pendatang gelap di Arakan padahal mereka telah beranakpinak berabad-abad sebelumnya.<sup>55</sup>

Mengutip laporan badan pengungsi PBB (UNHCR) etnis minoritas yang paling teraniaya di dunia. Bayangkan saja, di Burma, etnis Rohingya dianggap sebagai orang Bangladesh. Sebaliknya di Bangladesh, etnis Rohingya dianggap sebagai orang Burma. Padahal etnis Rakhine yang mendiami

---

<sup>55</sup> <http://hidayatullah.com/read/24249/09/08/2012/empat-hal-yang-bisa-dilakukan-untuk-rohingya.html>, diakses pada 8 Desember 2012

Bangladesh diakui sebagai warga negara Bangladesh, sedangkan etnis Rohingya yang mendiami Myanmar tidak diakui sebagai warga negara Burma karena mereka beragama Islam.

Sejak 10 Juni 2012, junta militer Burma telah menerapkan hukum darurat di Arakan. Kondisinya seperti Indonesia menerapkan darurat militer untuk umat Islam di Aceh pada tahun 2003-2004. Sejak berlaku undang-undang darurat ini, akses etnis Muslim Rohingya terhadap makanan, shelters, perubatan dan bantuan kemanusiaan lainnya sangat terbatas, bantuan yang diberikan oleh NGO harus melalui saluran pemerintah dan bantuan ini sedikit mengalir ke etnis Islam Rohingya tetapi banyak mengalir terhadap etnis Budha Rakhine yang dianakemaskan oleh pemerintah Myanmar.<sup>56</sup>

Selama ini sudah sering terjadi konflik di Arakan yang melibatkan antara kelompok etnis Rakhine dengan etnis Rohingnya. Misalnya pada 28 Mei 2012 yakni 3 etnis Muslim Rohingya dituduh memperkosa wanita Budha Rakhine. Namun, para analis menyakini kasus ini hanya rekayasa junta militer Myanmar. Akibatnya pada tanggal 3 Juni 2012, 10 Jamaah Tabligh secara brutal disalib di kawasan Taung Gok. Dan pada 8 Juni 2012, kaum Muslimin di Maung Daw berdoa untuk korban Jamaah Tabligh ini yang dibalas dengan sikap militer setempat yang menembak para jamaah Jum'at. Setelah itu etnis Rakhine yang didukung oleh aparat keamanan membakar mesjid, al-Quran, bahkan mesjid bersejarah di Akyab dan Maung Daw jadi rata dengan tanah sampai sekarang, pembakaran rumah kaum muslimin rohingya, mengeksekusi

---

<sup>56</sup> *Ibid*

paksa harta kekayaan etnis rohingya, dan pemerkosaan terhadap gadis-gadis Muslim Rohingya terus terjadi.

Kondisi kehidupan etnis Rohingya sangat memprihatinkan sebagai akibat tindakan kesewenang-wenangan Pemerintah Myanmar yang berusaha menghapus eksistensi etnis Rohingya sebagai bagian dari komponen bangsa Myanmar. Selama ini secara turun temurun telah terjadi perseteruan antara kelompok etnis Rohingya yang Muslim dan etnis lokal yang beragama Buddha. Rohingya tidak mendapat pengakuan oleh pemerintah setempat. Ditambah lagi agama yang berbeda. Beberapa laporan menyebutkan hingga saat ini sudah terjadi tragedi pembantaian lebih dari 6000 warga etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam.<sup>57</sup>

Selain tekanan yang dilakukan oleh militer dan pemerintahan Birma, etnis muslim Rohingyapun juga menjadi sumber konflik horisontal antar agama. Konflik horisontal ini semakin memanas ketika para tokoh pemuka agama sudah mulai ikut melakukan intervensi. Di sejumlah titik dekat pengungsian, sekelompok biksu mengeluarkan selebaran berisi peringatan kepada warga Myanmar untuk tidak bergaul dengan Muslim Rohingya. Sementara selebaran lainnya berisi rencana untuk memusnahkan kelompok etnis lain di Myanmar. Lebih rumit lagi, ketika dua organisasi biksu terbesar di Myanmar, Asosiasi Biksu Muda Sittwe dan Asosiasi Biksi Mrauk Oo menyerukan agar warga Myanmar tidak bergaul dengan Muslim Rohingya, sebab muslim Rohingya dianggap bukan kelompok etnis Burma dan menjadi akar penyebab kekerasan.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

Direktur Arakan Project LSM lokal, Chris Lewa, mengungkapkan biarawan Myanmar disebut turut andil menyebarkan kebencian terhadap Muslim Rohingya. Beberapa tahun terakhir, para biksu memainkan peranan dalam penolakan masuknya bantuan kepada umat Islam. Beberapa anggota badan kemanusiaan di Sittwe juga ikut bersaksi bahwa sejumlah biksu ditempatkan dekat kamp pengungsi. Mereka memeriksa setiap orang yang berkunjung lantaran khawatir akan memberikan bantuan. Para pengamat mengatakan, biksu Myanmar terlihat memblokir bantuan internasional yang ditujukan untuk pengungsi muslim. Di Sittwe misalnya, para biksu menolak untuk mengizinkan masuknya bantuan internasional. Menurut mereka, bantuan itu sangat bias. Amnesty Internasional mengatakan selepas bentrokan Muslim Rohingya kerap mendapat serangan fisik. Bahkan tak jarang jatuh korban.<sup>58</sup>

Sebagian besar kelompok etnis yang ada di Myanmar merupakan pemeluk agama Budha khususnya etnis Burma yang merupakan kelompok mayoritas. Berlangsungnya konflik antar etnis yang berlarut-larut tersebut telah menumbuhkan sikap kebencian dan permusuhan yang begitu mengakar kuat oleh etnis Burma dan etnis lainnya terhadap etnis Rohingya yang dianggap berbeda oleh kelompok mayoritas, baik dari aspek etnisitas maupun dari aspek keyakinan agama yang dianut. Kondisi ini diperparah oleh sikap rezim junta militer yang mendukung dan memelihara terjadinya konflik komunal antar etnis yang dibungkus dengan isu-isu SARA sehingga semakin

---

<sup>58</sup> <http://demokrasiindonesia.wordpress.com/2012/07/29/kisa-tragedi-pembantaian-etnis-muslim-rohingya-dari-dulu-hingga-kini/>, diakses pada 8 Desember 2012

menyulut berkembangnya konflik antar etnis yang mengarah pada upaya penghapusan etnis Rohingya sebagai bagian dari komponen bangsa Myanmar.

Sikap permusuhan dan kebencian yang ditanamkan oleh etnis Burma dan etnis-etnis lainnya dengan dukungan penuh pemerintahan rezim junta militer terhadap kelompok etnis Rohingya telah menimbulkan pertanyaan besar mengenai faktor penyebab munculnya sikap tersebut yang telah mendorong terjadinya kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis Rohingya di Myanmar.

Tindakan diskriminatif yang menimpa Muslim Rohingya berlatar belakang agama. Etnis muslim Rohingya dianggap menjadi sumber konflik horisontal antar agama. Konflik horisontal ini semakin memanas ketika para tokoh pemuka agama sudah mulai ikut melakukan intervensi. Di sejumlah titik dekat pengungsian, sekelompok biksu mengeluarkan selebaran berisi peringatan kepada warga Myanmar untuk tidak bergaul dengan Muslim Rohingya. Sementara selebaran lainnya berisi rencana untuk memusnahkan kelompok etnis lain di Myanmar. Lebih rumit lagi, ketika dua organisasi biksu terbesar di Myanmar, Asosiasi Biksu Muda Sittwe dan Asosiasi Biksi Mrauk Oo yang menyerukan agar warga Myanmar tidak berhubungan dengan Muslim Rohingya. Kelompok etnis mayoritas Burma yang mengendalikan pengaruhnya terhadap etnis-etnis lainnya menganggap bahwa Muslim Rohingya bukanlah kelompok etnis Burma. Atas alasan inilah yang menjadi legitimasi tindakan kebrutalan dan kesewenang-wenangan terhadap etnis

Rohingya yang mengarah pada upaya penghapusan etnis Rohingya dari Myanmar.

Direktur Arakan Project LSM lokal, Chris Lewa, mengungkapkan bahwa Biarawan Myanmar disebut turut andil menyebarkan kebencian terhadap Muslim Rohingya. Beberapa tahun terakhir, para biksu memainkan peranan dalam penolakan masuknya bantuan kepada umat Islam. Beberapa anggota badan kemanusiaan di Sittwe juga ikut bersaksi bahwa sejumlah biksu ditempatkan dekat kamp pengungsi. Mereka memeriksa setiap orang yang berkunjung lantaran khawatir akan memberikan bantuan. Para pengamat mengatakan, biksu Myanmar terlihat memblokir bantuan internasional yang ditujukan untuk pengungsi muslim. Di Sittwe misalnya, para biksu menolak untuk mengizinkan masuknya bantuan internasional. Menurut mereka, bantuan itu sangat bias. Amnesty Internasional mengatakan selepas bentrokan Muslim Rohingya kerap mendapat serangan fisik. Bahkan tak jarang menimbulkan korban jiwa.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*